

LAPORAN AKHIR

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA BIDANG MUTASI DAN
PROMOSI PNS TENTANG MUTASI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	4
II. PELAKSANAAN PEKERJAAN	5
A. PNS Pindah Masuk dan Pindah Keluar	5
1. Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Kelamin	5
2. Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Jabatan	6
3. OPD/Instansi Asal dan OPD Tujuan	7
B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional	8
1. Pengangkatan Pertama	8
2. Perpindahan ke Jabatan Fungsional	9
C. Mutasi Antar OPD	10
D. Pelantikan Jabatan Struktural dan Fungsional	11
III. HASIL KEGIATAN	14
IV. PEMBIAYAAN	18
V. PENUTUP	19
DAFTAR LAMPIRAN	13
Lampiran I : Daftar Nama PNS Pindah Masuk	
Lampiran II : Daftar Nama PNS Pindah Keluar	
Lampiran III : Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional	
Lampiran IV : Perpindahan ke Jabatan Fungsional	
Lampiran V : Daftar Nama PNS Mutasi Antar OPD	
Lampiran VI : Daftar Nama PNS Dilantik Jabatan Struktural	
Lampiran VII : Daftar Nama PNS Dilantik Jabatan Fungsional	



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

H. Ilyas Yakub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Telp./Fax. (0756) 22245 Kodepos 25651

Website: <http://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el :

bkpsdm@pesisirselatan.go.id

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN PADA BIDANG MUTASI
DAN PROMOSI PNS TENTANG MUTASI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Mutasi dan Promosi PNS tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tahun Anggaran 2025, Rekening Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 32.439.350.00

Laporan akhir ini berisi laporan tentang pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Mutasi tahun Anggaran 2025. Akhir Kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

RICKY SAPUTRA, S.E., M.M

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dinamika pergerakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti mutasi, pengangkatan dalam jabatan, perpindahan jabatan, serta pelantikan merupakan bagian dari sistem manajemen karier yang harus terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025, khususnya terkait PNS pindah masuk dan keluar, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, mutasi antar Perangkat Daerah, serta pelantikan Jabatan Struktural dan Fungsional.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan data kuantitatif dan nominatif PNS pindah masuk dan pindah keluar;
2. Menyajikan data PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional

- (pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan);
3. Menyajikan data PNS mutasi antar OPD;
 4. Menyajikan data PNS yang dilantik dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
 5. Menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan manajemen talenta dan perencanaan kebutuhan PNS.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami perubahan status administrasi kepegawaian selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 Pengusulan Mutasi Pindah Masuk Tahun 2025

Mutasi pindah masuk merupakan proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi atau pemerintah daerah asal ke instansi atau pemerintah daerah tujuan, dalam hal ini ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari manajemen PNS yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan organisasi, pengembangan karier pegawai, serta optimalisasi distribusi sumber daya manusia aparatur secara proporsional dan profesional.

2.1.1 Gambaran Umum Pengusulan Mutasi Pindah Masuk

Berdasarkan data pengusulan yang diterima selama Tahun 2025, detailnya Pada **Lampiran 1**, terdapat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang PNS yang mengajukan mutasi pindah masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, terdiri atas :

- **10 (sepuluh) Wanita** dan
- **15 (lima belas) Pria**.

Para PNS yang mengusulkan mutasi pindah masuk tersebut berasal dari berbagai instansi dan wilayah, baik dari dalam Provinsi Sumatera Barat maupun dari luar Provinsi Sumatera Barat. Adanya PNS yang berasal dari luar Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki daya tarik tersendiri sebagai daerah tujuan pengabdian, baik dari sisi kebutuhan organisasi, peluang pengembangan karier, maupun faktor personal lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data usulan mutasi pindah masuk PNS ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa para pegawai yang mengajukan perpindahan berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik dari lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun instansi vertikal kementerian. Dari sisi instansi asal, sebagian besar PNS berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mencerminkan adanya mobilitas internal dalam lingkup provinsi. Selain itu, terdapat pula PNS yang berasal dari berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

- ✓ Kabupaten Kepulauan Mentawai
- ✓ Kabupaten Padang Pariaman
- ✓ Kabupaten Solok
- ✓ Kabupaten Solok Selatan
- ✓ Kabupaten Sijunjung
- ✓ Kota Payakumbuh
- ✓ Kabupaten Kampar
- ✓ Provinsi Riau
- ✓ Kabupaten Mukomuko
- ✓ Kabupaten Tulungagung
- ✓ Kabupaten Tebo
- ✓ Kabupaten Lingga
- ✓ Kota Batam
- ✓ Kabupaten Sintang

Selain pemerintah daerah, terdapat pula PNS yang berasal dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Keberagaman instansi asal tersebut, termasuk dari luar Provinsi Sumatera Barat seperti Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, dari sisi tujuan penempatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, PNS yang mutasi pindah masuk akan ditempatkan pada berbagai Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan formasi serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Unit kerja tujuan tersebut meliputi antara lain:

- ✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk pada beberapa UPT satuan pendidikan seperti UPT SD dan SMP Negeri;
- ✓ Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- ✓ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ✓ Inspektorat Daerah;
- ✓ Sekretariat Daerah;
- ✓ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ✓ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, khususnya pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- ✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya pada Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- ✓ Serta beberapa UPT Puskesmas, antara lain UPT Puskesmas Kayu Gadang, Lumbo, Pasar Baru, dan Puskesmas Koto Berapak.

Penempatan tersebut mencerminkan kebutuhan sumber daya manusia yang tersebar pada sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal, kebencanaan, pemerintahan umum, hingga infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, mutasi pindah masuk ini tidak terpusat pada satu perangkat daerah saja, melainkan mendukung penguatan kapasitas organisasi secara menyeluruh di berbagai lini pelayanan publik.

2.1.2 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Jabatan PNS yang melakukan Mutasi Pindah Masuk

PNS yang mengajukan pindah masuk terdiri atas berbagai jenis jabatan. Berikut rekapitulasi pada Tahun 2025 tentang jabatan baru yang akan ditempati di Kabupaten Pesisir Selatan:

**Data Jabatan Baru bagi PNS yang melakukan Mutasi Pindah
Masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Jabatan Baru	Jumlah
1	Penelaah Teknis Kebijakan	8 (delapan) orang
2	Guru Ahli Pertama	5 (lima) orang
3	Guru Ahli Muda	1 (satu) orang
4	Guru TIK Pertama	1 (satu) orang
5	Perawat Terampil	1 (satu) orang
6	Perawat Penyelia	1 (satu) orang
7	Bidan / Bidan Terampil	2 (dua) orang
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 (satu) orang
9	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	1 (satu) orang
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1 (satu) orang
11	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1 (satu) orang
12	Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB	1 (satu) orang
13	Operator Layanan Operasional	1 (satu) orang
Total		25 (dua puluh lima) orang

Bedasarkan data diatas menunjukan bahwa terdapat berbagai jenis jabatan PNS pada tujuan mutasi pindah masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025.

2.1.3 Mutasi Pindah Keluar

Mutasi pindah keluar merupakan proses perpindahan PNS dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke instansi pemerintah daerah lain maupun instansi vertikal, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan mutasi pindah keluar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari manajemen PNS dan pengembangan karier pegawai. Berdasarkan data mutasi pindah keluar PNS dari

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**, tercatat sebanyak **13 (tiga belas) orang PNS** yang melaksanakan mutasi pindah keluar ke berbagai instansi tujuan. Terdiri atas : 9 Pria dan 4 Wanita

PNS yang mutasi pindah keluar tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah, dengan latar belakang jabatan struktural dan jabatan fungsional. Dari sisi instansi tujuan, mutasi pindah keluar dilakukan ke instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal kementerian, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.

2.1.4 Rekapitulasi PNS Mutasi Pindah Keluar Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah PNS Mutasi Pindah Keluar	13 (tiga belas) orang
2	Tujuan Instansi Provinsi	3 (tiga) orang
3	Tujuan Pemerintah Kabupaten/Kota	9 (Sembilan) orang
4	Tujuan Universitas Negeri	1 (satu) orang

Berdasarkan data mutasi pindah keluar PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, PNS yang melaksanakan mutasi pindah keluar terdiri atas berbagai jenis jabatan, baik jabatan Fungsional maupun Pelaksana. Adapun rincian jenis jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Jabatan	Rincian Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional	Guru Ahli Madya	2 (dua) orang
2		Perencana Ahli Muda	1 (satu) orang
3		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1 (satu) orang
4		Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	1 (satu) orang
5		Bidan Ahli Pertama	2 (dua) orang
6		Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	1 (satu) orang
7		Dokter Ahli Muda	1 (satu) orang
8		Pengadministrasi Umum	1 (satu) orang
9		Penelaah Teknis Kebijakan	3 (tiga) orang

No	Jenis Jabatan	Rincian Jabatan	Jumlah
Jumlah Keseluruhan			13 (tiga belas) orang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa mutasi pindah keluar PNS pada Tahun 2025 didominasi oleh **jabatan fungsional**, sementara **jabatan Pelaksana** hanya sebagian kecil dari keseluruhan jumlah PNS yang melaksanakan mutasi pindah keluar. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas PNS lebih banyak terjadi pada jabatan fungsional yang bersifat teknis.

2.1.5 Instansi Tujuan Mutasi Pindah Keluar

PNS yang melaksanakan mutasi pindah keluar tersebar pada beberapa instansi tujuan, antara lain:

- ✓ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- ✓ Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- ✓ Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- ✓ Pemerintah Kota Banjarbaru;
- ✓ Pemerintah Kota Banjarbaru;
- ✓ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Mutasi pindah keluar ini mencerminkan adanya dinamika dan mobilitas PNS antar instansi, yang tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kompetensi pegawai, serta tertib administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Pelaksana Ke dalam Jabatan Fungsional

Pada Tahun 2025, terdapat Pengusulan Proses Perpindahan Jabatan Pelaksana kedalam Jabatan Fungsional, data pada **Lampiran 2**, didapati sebanyak 10 (sepuluh) orang PNS telah di terbitkan SK Pengusulan Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional, yang terdiri atas :

- ✓ 4 (empat) Wanita, dan
- ✓ 6 (enam) Pria

2.2.1 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional yang dituju :

No	Jabatan	Jabatan Fungsional yang dituju	Jumlah
1	Jabatan Pelaksana	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1 (satu) orang
2		Perencana Ahli Pertama	2 (dua) orang
3		Administrator Kesehatan Ahli Muda	1 (satu) orang
4		Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama	4 (empat) orang
5		Epidemiolog Ahli Pertama	2 (dua) orang
Jumlah Keseluruhan			10 (sepuluh) orang

Rekapitulasi diatas menunjukkan terdapat beberapa jenis perpindahan ke dalam jabatan Fungsional dengan jumlah keseluruhan SK yang terbit sebanyak 10 (sepuluh) orang.

2.2.2 Rekapitulasi Data Pelantikan Jabatan Struktural

Pelantikan dalam jabatan struktural merupakan bagian dari sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk mengisi jabatan pimpinan dan jabatan administrasi dalam struktur organisasi pemerintahan daerah. Pelantikan PNS dalam jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan prinsip merit, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi. Selain itu, pelantikan jabatan struktural juga merupakan bagian dari pembinaan karier ASN agar dapat mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan data pelantikan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025, tercatat adanya pelantikan PNS dalam beberapa jenjang jabatan struktural. Pada **bulan Mei 2025**, telah dilaksanakan pelantikan sebanyak **16**

(enam belas) orang PNS dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis pada berbagai Perangkat Daerah, guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan serta meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan di masing-masing unit kerja.

Selain pelantikan pada jabatan Administrator dan Pengawas, pada Tahun 2025 juga dilaksanakan pelantikan **Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)** sebanyak **4 (empat) orang PNS**. Pelantikan pejabat Eselon II ini bertujuan untuk mengisi jabatan pimpinan pada Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.

2.4 Mutasi PNS antar Perangkat Daerah

Mutasi antar Perangkat Daerah adalah proses perpindahan Aparatur Sipil Negara (PNS) dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mutasi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi, pemerataan dan optimalisasi sumber daya manusia, serta pengembangan karier PNS sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Terdapat 11 usulan Mutasi antar Perangkat daerah dengan rincian :

No	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
1	Guru Kelas Ahli Madya	UPT SDN 16 Sungai Putih Kec. Bayang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Kelas Ahli Madya	UPT SDN 19 Pasar Lama Kec. Linggo Sari Baganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Guru Matematika Ahli Madya	UPT SMPN 3 Batang Kapas Kec. Batang Kapas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Matematika Ahli Madya	UPT SMPN 1 Painan Kec. IV Jurai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Guru Kelas Ahli Muda	UPT SDN 15 Koto Marapak Kec. Linggo Sari Baganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Kelas Ahli Muda	UPT SDN 25 Sungai Sirah Hilir Kec. Linggo Sari Baganti

4	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penelaah Teknis Kebijakan	Kantor Camat Bayang
5	Perawat Pelaksana Lanjutan/ Mahir	UPT Puskesmas Kayu Gadang Dinas Kesehatan	Perawat Pelaksana Lanjutan/ Mahir	UPT Puskesmas Surantih
6	Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama	UPT SMPN 3 Airpura Kec. Airpura Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama	UPT SDN 02 Airpura Kec. Airpura
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Umum - Sekretariat Daerah
8	Perawat Ahli Pertama	RSUD M.Zein Painan	Perawat Ahli Pertama	UPT Puskesmas Balai Selasa Dinas Kesehatan
9	Teknisi Elektromedis Mahir	UPT Puskesmas Kambang Dinas Kesehatan	Teknisi Elektromedis Mahir	RSUD M.Zein Painan
10	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Linggo Sari Baganti
11	Guru Ahli Pertama	UPT SDN 32 Langgai Kec. Sutera	Guru Ahli Pertama	UPT SDN 18 Sumedang Kec. Ranah Pesisir

Dari data diatas menunjukkan bahwa mutasi antar perangkat daerah terbanyak terjadi pada jabatan guru sebanyak 5 (lima) orang, diikuti jabatan perawat dan jabatan pelaksana. Pengusulan ini juga telah diterbitkan SK mutasi antar perangkat daerah sebanyak 11 orang, detail informasi disajikan pada **lampiran 3**.

BAB III

HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Mutasi dan Promosi PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pengelolaan mutasi pindah masuk dan pindah keluar, pengangkatan dalam jabatan fungsional, pelantikan jabatan struktural, serta mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya dinamika dan mobilitas ASN yang cukup signifikan sebagai bagian dari upaya penataan organisasi dan pengembangan karier pegawai.

3.1 Hasil Pengelolaan Mutasi Pindah Masuk

Selama Tahun 2025, tercatat sebanyak **25 (dua puluh lima) orang PNS** melaksanakan mutasi pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 15 (lima belas) pria dan 10 (sepuluh) wanita.

Mutasi pindah masuk tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal kementerian, termasuk dari dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas ASN serta adanya kebutuhan organisasi yang spesifik pada berbagai perangkat daerah. Dari sisi jabatan, mutasi pindah masuk didominasi oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, antara lain:

- ✓ Penelaah Teknis Kebijakan
- ✓ Guru (Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Guru TIK)
- ✓ Tenaga Kesehatan (Perawat, Bidan, Tenaga Promosi Kesehatan)
- ✓ Analis Kebijakan dan Analis Kebencanaan

- ✓ Penggerak Swadaya Masyarakat
- ✓ Jabatan struktural (Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB)

Penempatan dilakukan pada berbagai perangkat daerah seperti sektor pendidikan, kesehatan, keuangan daerah, kebencanaan, pemerintahan umum, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan dampak terhadap penguatan kapasitas pelayanan publik secara merata.

3.2 Hasil Mutasi Pindah Keluar

Pada Tahun 2025, tercatat sebanyak **13 (tiga belas) orang PNS** melaksanakan mutasi pindah keluar, terdiri atas 9 (sembilan) pria dan 4 (empat) wanita. Mutasi pindah keluar dilakukan ke instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal kementerian dan perguruan tinggi negeri. Dari sisi jabatan, mutasi pindah keluar didominasi oleh jabatan fungsional seperti Guru, Perencana, Analis SDM Aparatur, Penyuluh Pertanian, Bidan, Dokter, serta Penelaah Teknis Kebijakan. Data ini menunjukkan bahwa mobilitas ASN lebih banyak terjadi pada jabatan fungsional yang bersifat teknis dan profesional, sebagai bagian dari pengembangan karier dan kebutuhan organisasi di instansi tujuan.

3.3 Hasil Pengangkatan Melalui Perpindahan ke Jabatan Fungsional

Pada Tahun 2025 telah diterbitkan **10 (sepuluh) Surat Keputusan** pengangkatan melalui perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional, terdiri dari 6 (enam) pria dan 4 (empat) wanita. Jenis jabatan fungsional yang dituju meliputi:

- ✓ Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
- ✓ Perencana Ahli Pertama
- ✓ Administrator Kesehatan Ahli Muda
- ✓ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
- ✓ Epidemiolog Ahli Pertama

Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme ASN melalui penyesuaian jabatan berbasis kompetensi dan kualifikasi pendidikan, sekaligus mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

3.4 Hasil Pelantikan Jabatan Struktural

Sepanjang Tahun 2025, telah dilaksanakan pelantikan jabatan struktural sebagai berikut: **16 (enam belas) orang** dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (bulan Mei 2025). **3 (tiga) orang** dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi jabatan strategis pada perangkat daerah guna menjamin kesinambungan kepemimpinan, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kinerja organisasi.

3.5 Hasil Mutasi Antar Perangkat Daerah

Mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 berjumlah **11 (sebelas) orang** dan seluruhnya telah diterbitkan Surat Keputusan mutasi. Mutasi antar OPD didominasi oleh: Jabatan Guru (5 orang), Jabatan Perawat dan Tenaga Kesehatan, Jabatan Pelaksana (Penelaah Teknis Kebijakan dan teknis). Mutasi ini bertujuan untuk pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, optimalisasi pelayanan pada UPT sekolah dan puskesmas, serta penyesuaian kebutuhan organisasi pada unit kerja kecamatan dan perangkat daerah lainnya.

3.6 Evaluasi Umum Hasil Kegiatan

Berdasarkan keseluruhan data Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi keseimbangan antara jumlah PNS pindah masuk (25 orang) dan pindah keluar (13 orang), sehingga secara kuantitatif masih terjadi penambahan SDM sebanyak 12 orang.

2. Mobilitas ASN didominasi oleh jabatan fungsional, yang menunjukkan meningkatnya profesionalisasi jabatan berbasis kompetensi.
3. Penataan jabatan melalui pelantikan dan mutasi antar OPD telah mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Proses administrasi kepegawaian telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, dan sistem merit.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pada Bidang Mutasi dan Promosi PNS Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap penataan manajemen ASN yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Mutasi dan Promosi PNS Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Rekening Kegiatan **5.03.02.2.02.0001** dengan total anggaran sebesar **Rp 32.439.350,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Mutasi dan Promosi PNS yang meliputi:

1. Proses administrasi mutasi pindah masuk dan pindah keluar PNS;
2. Pengusulan dan penerbitan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
3. Fasilitasi pelantikan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
4. Proses mutasi antar Perangkat Daerah;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi administrasi kepegawaian.

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Mutasi dan Promosi PNS Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup pengelolaan mutasi pindah masuk dan pindah keluar, pengangkatan dalam jabatan fungsional, pelantikan jabatan struktural, serta mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutasi dan promosi PNS telah berjalan secara tertib administrasi, akuntabel, dan mengacu pada prinsip sistem merit. Dinamika pergerakan ASN yang terjadi menunjukkan adanya kebutuhan organisasi yang terus berkembang, sekaligus menjadi bagian dari pembinaan dan pengembangan karier pegawai.

Painan, 30 Desember 2025

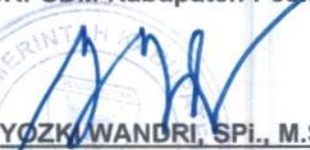
Disetujui oleh :
Kepala Bidang Mutasi dan
Promosi ASN BKPSDM Kab.
Pesisir Selatan

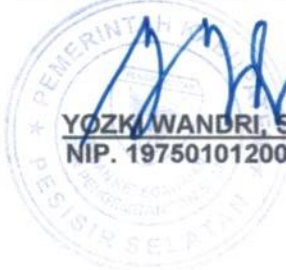

SEPTRIA NEVITA, S.E., M.I.Kom
NIP. 198609132011012017

Disusun oleh :
Analisis Sumber Daya Manusia
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan


RICKY SAPUTRA, S.E., M.M
NIP. 199602252019031001

Diketahui oleh :
Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan


YOZI WANDRI, S.Pi., M.Si
NIP. 197501012000031003



LAMPIRAN 1
Data Rekap Mutasi Pindah Masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	BULAN	ASAL	ALAMAT	NAMA	NIP	PANGKAT LAMA/GOL. RUANG/TMT	JABATAN LAMA	UNIT KERJA	INSTANSI	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
1	April 2025	Gubernur Sumatera Barat	Padang	YUSMA JOYO, S.Pd.,M.M.	197206052007011010	Penata Tk. I (III/d)/ 01 April 2014	Guru Ahli Muda	SMKN 1 Sutera	Provinsi Sumatera Barat	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	April 2025	Gubernur Sumatera Barat	Padang	HARMEN SABRI, S.ST	198405022005011002	Penata Tk. I (III/d)/ 01 April 2022	Sekretaris Pimpinan	Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Provinsi Sumatera Barat	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	April 2025	Bupati Tulungagung	Tulungagung	ARYA AKBAR, S.E.	198407312010121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadmnistrasi Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tulungagung	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4	April 2025	Bupati Kepulauan Mentawai	Tuapejat	SARDIANOFI, A.Md.,Kep.	198205212014032001	Pengatur (II/d)	Perawat Terampil	Rumah Sakit Umum Daerah	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Perawat Terampil	UPT Puskesmas Kayu Gadang
5	April 2025	Bupati Padang Pariaman	Parit Malintang	RIARESTI MILA SARI, A.Md.Keb.	198802032017042008	Pengatur Tk. I (III/d)/ 01 April 2022	Bidan Terampil/ Pelaksana	UPTD Puskesmas Patamuan	Kabupaten Padang Pariaman	Bidan Terampil/ Pelaksana	UPT Puskesmas Kayu Gadang
6	Mei 2025	Menteri Agama Republik Indonesia	Padang	Dr. LILIS ANDRIANI, M.Pd.	197110222002122002	Pembina Utama Muda (IVc)/ 01 Juni 2025	Kepala	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1	Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Mei 2025	Bupati Sintang	Sintang	RIDAPESPERA, S.Pd.	198609142017082001	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 Oktober 2021	Guru Ahli Pertama	SD Negeri 2 Ambalau	Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	Guru Ahli Pertama	UPT SDN 01 Koto Merapak Kec. Sutera
8	Januari 2026	Walikota Batam	Batam	HELEN, AMK	197707232006042027	Penata (III/d)/ 01 April 2022	Perawat Penyelia	Dinas Kesehatan	Kota Batam	Perawat Penyelia	UPT Puskesmas Pasar Baru
9	Mei	Bupati Tebo	Tebo	INDRAGUSMAN, S.Pd.	198510272014021001	Penata (III/c)/ 01 Oktober 2022	Guru Ahli Muda	UPD SD Negeri 210/MI Tanjung Dani Kec. Sumay	Kabupaten Tebo	Guru Ahli Muda	UPT SDN 16 Sungai Puth Kecamatan Bayang
10	Juni 2025	Bupati Sintang	Sintang	ISMAL EFENDI HUTASUHUT, S. Pd	198902062017081002	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 Oktober 2021	Guru Ahli Pertama	SD Negeri 13 Nanga Bayan	Kabupaten Sintang	Guru Ahli Pertama	UPT SD Negeri 03 Simpang Kec Koto Xi Tarusan
11	Juni 2025	Bupati Sintang	Sintang	SURI OKA ASIH HARAHAP, S. Pd	198810012017082002	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 Oktober 2021	Guru Ahli Pertama	SD Negeri 13 Nanga Bayan	Kabupaten Sintang	Guru Ahli Pertama	UPT SD Negeri 03 Simpang Kec Koto Xi Tarusan

12	Juli 2025	Bupati Lingga	Lingga	DEBI ABDILLAH, S.Pd	198702222015031002	Penata Muda Tk. I (IIIb) 01 April 2019	Guru TIK Pertama	SMP Negeri 1 Singkep Barat	Kabupaten Lingga	Guru TIK Pertama	SMPN 1 Koto XI Tarusan
13	Juli 2025	Gubernur Sumatera Barat	Padang	ZULKFLI, SH	197712122000031001	Penata Tk. I (III d) 01 Oktober 2018	Pengadministrasi Umum	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
14	Juli 2025	Gubernur Sumatera Barat	Padang	MARIES, S.H, M.M	198003092007012003	Penata Tk. I (III d) 01 Oktober 2022	Analisis Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Provinsi Sumatera Barat	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Juli 2025	Bupati Solok Selatan	Padang Aro	ZULHITA SUSANTI, A.Md.Keb	198712082017042011	Pengatur (IIIc) 01 April 2017	Bidan	Puskesmas Lubuk Ulang Aling	Kabupaten Solok Selatan	Bidan	Puskesmas Koto Berapak
16	Agustus 2025	Bupati Kepulauan Mentawai	Tuapejat	SISKAMARLINA	198403202009012013	Pengatur Tk. I (III d) 01 Oktober 2021	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	UPT Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Operator Layanan Operasional	Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Agustus 2025	Gubernur Sumatera Barat	Padang	FIRMANTO, S.IP	198804192007011002	Penata Tk. I (III d) 01 April 2018	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Provinsi Sumatera Barat	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Agustus 2025	Bupati Kampar	Bangkinang Kota	YOSSAR, S.Pd, M.M.	198707052019031001	Penata Muda Tk.I (IIIb)	Guru Ahli Pertama	UPT SMP Negeri 2 Kampar Kiri Hulu	Kabupaten Kampar	Guru Ahli Pertama	UPT SMP Negeri 2 Lengayang
19	Agustus 2025	Gubernur Sumatera Barat	Padang	ILHARMEN, S.Pd	197109302005021003	Pembina TK.I (IVb)	Guru Ahli Madya	UPT SMAN 1 Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	September 2025	Walikota Payakumbuh	Payakumbuh	NOVRI, S.E	197011181993031005	Penata TK.I (III d)	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kota Payakumbuh	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LAMPIRAN 2

Data Rekap Mutasi Pindah Keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

N	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. TM	JABATAN	UNIT KERJA	TUJUAN MUTASI	TEMPAT	PROVINS	NOMOR SURF	TANGGAL SURAT	INSTANSI TUJUAN	JABATAN BARU	PENEMPATAN BARU
1	HARRISON TAR, S.Pi., M.Si.	197007031 999031002	Pembina (IV/a)	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Bupati Dharmasraya	Pulau Punjung	Sumatera Barat	824.4/09/BKPSD M/2024	04 Oktober 2024	Kabupaten Dharmasraya	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2	HARDAYANTI, SH., MM.	197507261 997032004	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Komunikas dan Informatika	Gubernur Sumatera Barat	Padang	Sumatera Barat	800.1.3.1/8151/III /BKD-2024	6 Desember 2024	Provinsi Sumatera Barat	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	MUHAMMAD ABDIANSYAH, SST.	198312232 017061001	Penata Muda Tk I (II/b)	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Dinas Pertanian	Bupati Tanah Laut c.q. Sekretaris Daerah	Pelaihari	Kalimantan Selatan	800.1.3.1/443-MPA/BKPSDM/VI/2024	03 Juni 2024	Kabupaten Tanah Laut	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4	WENDRA ROVIKTO, S.STP M.Si.	198301192 001121003	Pembina Tk I (IV/b)	Kepala	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gubernur Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat	800.1.3.1/0772/III /BKD-2025	7 Februari 2025		Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Dinas Sosial
5	NEZA ANGRELIA, S.Tr.Keb.	198905232 017042008	Penata Muda (III/a)	Bidan Ahli Pertama	UPT Puskesmas Koto Baspak	Walikota Banjarbaru	Banjarbaru	Kalimantan Selatan	800.1.3.1/0284/B KPSDM	29 April 2025	Kota Banjarbaru	Bidan Ahli Pertama	Puskesmas Sungai Besar Dinas Kesehatan
6	YULIA VERNADES LISTRI, S.Tr.Keb	198806112 010012017	Penata Muda Tk I (II/b)	Bidan Ahli Pertama	UPT Puskesmas Koto Baru	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Padang		T/8829/UN16.26 R/KP.09.00/2024	02 September 2024	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan	Bidan Ahli Pertama	Universitas Andalas
7	JUNAI, S.Kom., M.E.	197006091 997031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gubernur Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat	800.1.3.1/3836/III /BKD-2025	20 Juni 2025		Pengadmi nistrasi Umum	Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik
8 dr.	MUHAMMAD FAHRIZA SA, MARS.	198201042 009021003	Pembina (IV/a)	Direktur	RSUD M. Zein Painan	Bupati Dharmasraya	Pulau Punjung	Sumatera Barat	800.1.3.1/02/BKP SDM-2025	21 April 2025	Kabupaten Dharmasraya	Dokter Ahli Muda	UPTD RSUD Sungai Dareh Dinas Kesehatan
9	OKTAVIANI, S.Pd.I,Kens	198710072 010012028	Penata Muda Tk I (III/d)	Guru Ahli Muda/Bimbingan Konseling	UPT SMPN 1 Bayang Utara	Bupati Lima Puluh Kota.	Sarliamak	Sumatera Barat	800.1.3.1/415/BK PSDM-LK/2025	28 Mei 2025	Kabupaten Lima Puluh Kota	Guru Ahli Muda/Bimbingan Konseling	UPT SMPN 1 Kec. Payakumbuh
10 dr.	LILA SARI	198502022 014072001	Penata Tk I (III/d)	Dokter Ahli Muda	UPT Puskesmas Air Haji	Wali Kota Padang	Padang	Sumatera Barat	824.476/BKPSD M-MP.1-PDG/2024	5 Agustus 2024	Kota Padang	Dokter Ahli Muda	RSUD dr. Rasidin Kota Padang
11 dr.	BOY HARRIYADI,	197303142 005011005	Pembina Tk I (IV/b)	Dokter Ahli Madya	RSUD M. Zein Painan	Gubernur Lampung	Bandar Lampung	Lampung	800.1.3.1/2865/VI .04/2025	13 Juni 2025	Bandar Lampung	Dokter Ahli Madya	RSUD Dr. H. Abdul Moeleok
12	AGUNG FRANS PATAR SIAGIAN, S.Tr.IP	199905192 021081001	Penata Muda Tk I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah	Wali Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Sumatera Barat	800.1.3.1/58/II-PI- BKPSDM/2025	28 Oktober 2025	Kota Bukittinggi	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Seksi Pengendalian Lapangan dan Pengamanan Bidang Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
13	NOVALINA ELSA PUTRI, S.IP	198211132 010012020	Penata Muda Tk I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah	Selektaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	Jakarta		B-2358/KP.03.06/S J/11/2025	21 November 2025	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
14 dr.	SONYA ARMA PUTRI	198701142 014122001	Penata Tk I (III/d)	Dokter Ahli Muda	UPT Puskesmas Tarusan	Rektor Universitas Andalas	Padang	Sumatera Barat	T/2842/sun16.26 R/KP.09.00/2025	19 November 2025	Universitas Andalas, Padang	Dokter Ahli Muda	Rumah Sakit Universitas Andalas

LAMPIRAN 3
Data Rekap Perpindahan dari Jabatan lain ke Jabatan Fungsional Tahun 2025

NO	JABATAN BARU	saudara	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	GOLONGAN RUANG	GOL/ RUANG/ TMT	DIANGKAT DALAM JABATAN	REKOMENDASI BKN	TGL REKOM BKN	UNIT KERJA	TMT	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	CAKUP
1	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Ricky Saputra, S.E., M.M	RICKY SAPUTRA, S.E., M.M	199602252019031001	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 April 2023	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	30808/R-AK.02.03/50/0/2025	05 Desember 2025	Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	01 Januari 2026	89,063	540.000,00	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
2	PERENCANA	Deasy Itravia, S.E	DEASY ITRAVIA, S.E	197712062007012008	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata (III/c)	Penata (III/c)/ 01 April 2025	Perencana Ahli Pertama	30808/R-AK.02.03/50/0/2025	05 Desember 2025	Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	01 Januari 2026	100	540.000,00	Perencana
3	PERENCANA	Afrioldi Putra, S.Pd	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd	198204202011011006	Fungsional Umum	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 April 2023	Perencana Ahli Pertama	30808/R-AK.02.03/50/0/2025	05 Desember 2025	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	01 Januari 2026	84,375	540.000,00	Perencana
4	ADMINISTRATOR KESEHATAN	Fitria Yomi Swadharna, SKM, M.M.	FITRIA YOMI SWADHARMA, SKM, M.M.	197806082003122007	Pelaksana	Penata Tk. I (III/d)	Penata Tk. I (III/d)/ 01 April 2022	Administrator Kesehatan Ahli Muda	31882/R-AK.02.03/50/0/2025	10 Desember 2025	Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan	01 Januari 2026	177,085	600.000,00	Administrator Kesehatan
5	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Syahroni, S.H., M.H.	SYAHRONI, S.H., M.H.	198606262019031001	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 April 2023	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	05515/R-AK.02.03/50/0/2026	22 Januari 2026	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	01 Februari 2026	90,825	525.000,00	Perancang Peraturan Perundang-Undangan
6	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Fakhriza Kheir, S.H.	FAKHRIZA KHEIR, S.H.	198804152019031001	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 April 2023	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	05515/R-AK.02.03/50/0/2026	22 Januari 2026	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	01 Februari 2026	84,375	525.000,00	Perancang Peraturan Perundang-Undangan
7	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Muhammad Ridho Dwitama, S.H.	MUHAMMAD RIDHO DWITAMA, S.H.	199412282019031001	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 April 2023	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	05515/R-AK.02.03/50/0/2026	22 Januari 2026	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Pada Sekretariat DPRD	01 Februari 2026	90,825	525.000,00	Perancang Peraturan Perundang-Undangan
8	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Muhammad Afif Alfanda, S.H., M.Kn	MUHAMMAD AFIF ALFIANDA, S.H., M.Kn	199701232020121007	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 Desember 2024	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	05515/R-AK.02.03/50/0/2026	22 Januari 2026	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Pada Sekretariat DPRD	01 Februari 2026	89,792	525.000,00	Perancang Peraturan Perundang-Undangan
9	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Zulkanova, SKM	ZULKANOVA, SKM	197511212005012010	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 April 2022	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	05515/R-AK.02.03/50/0/2026	22 Januari 2026	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	01 Februari 2026	98,582	500.000,00	Epidemiolog Kesehatan
10	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Andesa Triana Putri, SKM	ANDESA TRIANA PUTRI, SKM	197512242007012003	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/a)/ 01 Oktober 2023	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	05515/R-AK.02.03/50/0/2026	22 Januari 2026	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	01 Februari 2026	76,041	500.000,00	Epidemiolog Kesehatan

LAMPIRAN 4
Data Rekap Perpindahan dari Jabatan lain ke Jabatan Fungsional Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU	TMT	Bulan SK	Nomor SK
1	SUMARDI, S.Pd.SD.	1970021019910110 01	Pembina Tk. I (IV/b)	Guru Kelas Ahli Madya	UPT SDN 16 Sungai Putih Kec. Bayang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Kelas Ahli Madya	UPT SDN 19 Pasar Lama Kec. Linggo Sari Baganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Maret 2025	Februari	800.1.3. 1/ /MP- BKPSDM /2025
2	ELVI DESWITA, S.Pd.	1983032610110120 11	Pembina (IV/a)	Guru Matematika Ahli Madya	UPT SMPN 3 Batang Kapas Kec. Batang Kapas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Matematika Ahli Madya	UPT SMPN 1 Painan Kec. IV Jurai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Maret 2025	Februari	800.1.3. 1/ /MP- BKPSDM /2025
3	RISMANELI, S.Pd.	1981050220110120 12	Penata (III/c)	Guru Kelas Ahli Muda	UPT SDN 15 Koto Marapak Kec. Linggo Sari Baganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Kelas Ahli Muda	UPT SDN 25 Sungai Sirah Hilir Kec. Linggo Sari Baganti	1 April 2025	Maret	800.1.3. 1/ /MP- BKPSDM /2025
4	TOMMI YULI HENDRI, S.PdI.	1986072020140710 02	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penelaah Teknis Kebijakan	Kantor Camat Bayang	1 Maret 2025	Februari	800.1.3. 1/ /MP- BKPSDM /2025
5	NEVI NELVITA, A.Md. Kep.	1976101520060420 13	Penata Muda Tk. I (III/b)	Perawat Pelaksana Lanjutan/ Mahir	UPT Puskesmas Kayu Gadang Dinas Kesehatan	Perawat Pelaksana Lanjutan/ Mahir	UPT Puskesmas Surantih	1 Maret 2025	Februari	800.1.3. 1/ /MP- BKPSDM /2025
6	NERI SUSANTI, SS.	1982111720140720 02	Penata Muda (III/a)	Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama	UPT SMPN 3 Airpura Kec. Airpura Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama	UPT SDN 02 Airpura Kec. Airpura	1 Maret 2025	Februari	800.1.3. 1/ /MP- BKPSDM /2025
7	AGUNG FRANS PATAR SIAGIAN, S.Tr.IP.	1999051920210810 01	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	1 Mei 2025	April	800.1.3. 1/ /MP- BKPSDM /2025

8	Ns. GEFRINA BELLA ISRIANI, S.Kep.	1993060820190320 01	Penata Muda Tk. I (III/b)	Perawat Ahli Pertama	RSUD M.Zein Painan	Perawat Ahli Pertama	UPT Puskesmas Balai Selasa Dinas Kesehatan	1 Novembe r 2025
9	ZETKI MILARINO, A.Md. Tem	1985071120110110 09	Penata Muda (III/a)	Teknisi Elektromedis Mahir	UPT Puskesmas Kambang Dinas Kesehatan	Teknisi Elektromedi s Mahir	RSUD M.Zein Painan	1 Novembe r 2025
10	SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat	1997091620201220 04	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Linggo Sari Baganti	1 Novembe r 2025
11	EFRIANTO	1984071220070110 03	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran	Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan,	Pengadmini strasi Perkantoran	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat IV Jurai	1 Novembe r 2025
12	SILMA YURIKA SARI, S.Pd.	1989012220201220 06	Penata Muda (III/a)	Guru Ahli Pertama	UPT SMPN 4 Silaut Kec. Silaut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama	UPT SMPN 1 Bayang Kec. Bayang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Novembe r 2025

Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si
NIP. 197501012000031003